



Dampak globalisasi terhadap proses demokrasi di Indonesia

Syahrinda Fina¹, Timbul Dompok², Wasiman³

^{1,2,3}Universitas Putera Batam Indonesia, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks stabilitas dan kualitas demokrasi. Globalisasi, selain membawa kemajuan ekonomi dan integrasi global, juga menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah dominasi korporasi besar dalam politik yang dapat melemahkan peran masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi muncul ketika pemerintah dianggap kurang tanggap terhadap kesenjangan ekonomi yang diperburuk oleh globalisasi. Di era digital, penelitian ini juga menyoroti peran internet dalam memperluas partisipasi politik masyarakat sekaligus menekankan pentingnya literasi digital untuk mencegah manipulasi informasi. Studi ini merekomendasikan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta memperkuat keterlibatan masyarakat sipil untuk memperkuat landasan demokrasi di tengah tantangan globalisasi.

Kata Kunci

Demokrasi, Globalisasi, Strategi, Peran Masyarakat

PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari istilah Yunani "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan, mengacu pada suatu sistem pemerintahan yang secara keseluruhan dijalankan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat. Konsep demokrasi tidak hanya menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan, tetapi juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam studi ilmu politik secara luas. Demokrasi pada masa kini sering dianggap sebagai indikator yang signifikan dalam menilai kemajuan politik suatu negara (Nihaya, 2016). Kata "etika" sering digunakan untuk merujuk pada nilai-nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Etika berhubungan dengan isu nilai, karena inti dari pembahasan etika adalah konsep "baik" dan "buruk".

Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap individu memiliki hak yang setara dan sama untuk memberikan suara serta berpartisipasi secara aktif dalam proses penentuan arah dan kebijakan pemerintahan. Hal ini memungkinkan tercapainya keinginan dan kepentingan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, dengan cara yang dapat memberikan suara dan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan harapan serta kebutuhan mereka. Demokrasi

juga mendorong adanya pengawasan yang aktif dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki peranan yang penting dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik dan transparan. Pemerintah yang terpilih melalui proses demokratis juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada rakyat, sehingga mereka harus siap memberikan penjelasan atas kebijakan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan adanya tanggung jawab ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi.

Melalui demokrasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka, memperjuangkan hak-hak yang dimiliki, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses penentuan masa depan mereka. Demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, melainkan juga mencakup nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Nilai-nilai ini merupakan dasar penting untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan suatu masyarakat (Ulfyyati et al., 2023). Konsep etika dan demokrasi dapat diartikan bahwa untuk mencapai penerapan demokrasi yang ideal di masyarakat, sangat diperlukan adanya nilai dan norma moral yang bersifat normatif. Nilai dan norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam partisipasi demokrasi, sehingga setiap orang dapat berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab.

Era digital yang terus berkembang memberikan tantangan dan peluang baru bagi demokrasi. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era modern ini, di mana interaksi antara negara dan masyarakat di seluruh dunia semakin intensif. Proses globalisasi telah membawa berbagai dampak yang signifikan, baik yang bersifat positif maupun negatif, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik yang sangat krusial. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang dan dikenal karena keragaman budaya serta sosialnya, pemahaman tentang dampak globalisasi terhadap stabilitas demokrasi menjadi semakin penting dan mendesak untuk dibahas. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan perdagangan, tetapi juga menyeret berbagai isu lain seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan keterlibatan politik masyarakat. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai bagaimana fenomena global ini berinteraksi dengan nilai-nilai demokrasi yang ada menjadi sangat relevan.

Demokrasi di Indonesia, yang telah mengalami perjalanan panjang sejak reformasi 1998, menghadapi berbagai tantangan dalam proses globalisasi, seperti penyebaran informasi yang cepat, arus investasi asing, serta pengaruh nilai-nilai dan norma-norma eksternal. Sementara di satu sisi, globalisasi dapat memperkuat institusi demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi.

Di banyak negara, globalisasi sering kali berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi. Salah satu cara di mana hal ini terjadi adalah melalui peningkatan pengaruh korporasi besar dalam politik. Dalam era globalisasi, perusahaan multinasional memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, sering kali melampaui kemampuan pemerintah nasional. Lobbying dan pengaruh politik yang dilakukan oleh korporasi dapat mengarah pada kebijakan yang tidak selalu mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih menguntungkan segmen-segmen tertentu dari masyarakat.

Krisis demokrasi juga dapat dilihat dari sudut pandang legitimasi institusi. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi demokrasi karena ketidakpuasan terhadap hasil-hasil ekonomi globalisasi, maka legitimasi institusi tersebut terguncang. Hal ini diperburuk oleh kurangnya respons pemerintah terhadap isu-isu ketidaksetaraan yang diperparah oleh globalisasi. Ketidakpuasan ini menciptakan ruang bagi munculnya gerakan-gerakan anti-establishment yang seringkali mengancam stabilitas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana globalisasi mempengaruhi stabilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak globalisasi serta memberikan rekomendasi untuk mempertahankan dan memperkuat demokrasi di tengah arus global yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika demokrasi di Indonesia dan tantangan yang dihadapi di era globalisasi saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai landasan dalam metodologinya. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan utama untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan lebih mendalam dan komprehensif. Dalam melaksanakan penelitian ini, proses yang dilakukan adalah dengan mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami. Deskripsi ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memberikan

pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta dengan interpretasi yang akurat. Dengan pendekatan ini, berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakat sipil akan dianalisis dan diinterpretasikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Data ini meliputi informasi yang dihimpun dari studi-studi terdahulu, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang relevan yang membahas dampak globalisasi terhadap proses demokrasi di Indonesia. Sumber-sumber tersebut memberikan argumen dan analisis yang signifikan dalam memahami perspektif serta pengalaman para aktor yang terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dengan mengeksplorasi informasi dari sumber-sumber ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai dinamika yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Dalam kajian sejarah teori demokrasi, terdapat dua fakta historis yang signifikan. Pertama, mayoritas individu di era modern ini menganggap diri mereka sebagai penganut demokrasi. Namun, apa yang diungkapkan atau dilakukan oleh satu rezim sering kali berbeda dengan rezim lainnya. Kedua, meskipun banyak negara yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, lembaga politik di negara-negara tersebut sering kali menunjukkan adanya kerawanan dan ketidakstabilan dalam tatanan demokrasi.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase sebelum kemerdekaan dan fase setelah kemerdekaan. Setelah berhasil meraih kemerdekaan, perjalanan perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya ketidakstabilan yang cukup signifikan. Ketidakstabilan ini berlangsung secara terus-menerus sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana demokrasi dapat beradaptasi dan terbentuk dengan baik dalam menghadapi berbagai aspek negatif yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai suatu sistem kehidupan, tatanan demokratis secara empiris berkaitan dengan isu-isu yang muncul dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, atau sebaliknya, hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang berada dalam posisi seimbang dan saling

melakukan pengawasan terhadap satu sama lain (Purnamawati, 2020). Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase berdasarkan waktu (Akbar et al., 2023).

1. Demokrasi parlementer (1950-1955)

Demokrasi parlementer di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dan berlangsung hingga 1959. Era ini ditandai oleh adanya parlemen yang kuat dan pemilihan umum untuk wakil rakyat. Indonesia menganut sistem ini berdasarkan model Belanda, dengan kekuasaan legislatif yang dominan. Penandatanganan Konstitusi RIS pada tahun 1950 membuat sistem pemerintahan federal, tetapi tidak berhasil dan diakhiri pada 1959. Beberapa partai besar, seperti PNI, PKI, Masyumi, PSI, dan Partai Katolik berperan penting dalam koalisi pemerintahan. Namun, ketegangan politik meningkat, terutama antara PNI dan PKI, mengarah kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Pada akhir 1959, Soekarno mengumumkan pembubaran demokrasi parlementer dan beralih ke sistem demokrasi terpimpin, menandai akhir era tersebut hingga 1965.

2. Demokrasi terpimpin (1959-1965)

Setelah demokrasi parlementer, Indonesia menganut demokrasi terpimpin dari 1959 hingga 1965. Soekarno mengusulkan sistem ini sebagai alternatif untuk demokrasi parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden, sementara peran parlemen lebih terbatas. Demokrasi terpimpin menghadapi kritik, terutama menjelang peristiwa G30S/PKI tahun 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto dengan Supersemar. Soeharto kemudian mengganti sistem politik menjadi Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru berakhir pada 1998, Indonesia beralih ke demokrasi liberal, namun periode demokrasi terpimpin tetap diingat sebagai masa yang kompleks dan kontroversial dalam sejarah politik Indonesia.

3. Demokrasi pancasila (1965-1998)

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia berdasarkan filsafat Pancasila. Sistem ini mengintegrasikan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila, seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia, memberikan warga negara kesempatan berpartisipasi dalam keputusan politik. Lima sila Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan menjadi landasan kehidupan berbangsa. Praktiknya melibatkan pemilihan umum reguler dan jaminan kebebasan bersuara. Namun, demokrasi Pancasila menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial. Pemerintah berusaha memperkuat sistem

ini melalui peningkatan partisipasi publik dan lembaga demokrasi. Meskipun telah ada sejak 1945, pengembangan demokrasi Pancasila terus berubah, terutama pascareformasi 1998, dengan peningkatan perlindungan hak asasi manusia.

4. Demokrasi era reformasi (1998-sekarang)

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 ditandai dengan lengsernya Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun lamanya. Demokrasi Indonesia kini memiliki fondasi yang kuat, terlihat melalui kebebasan pers dan sistem multipartai, seperti dalam Pemilu 1999. Rakyat memiliki peluang untuk bersatu sesuai ideologi dan aspirasi politik. Karakteristik utama adalah demokrasi Pancasila, di mana warga negara mengawasi pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan. Ciri khas reformasi mencakup Pemilu yang lebih demokratis dan peralihan kekuasaan di pemerintah pusat dan daerah. Rekrutmen politik dilakukan terbuka, melindungi hak-hak warga negara, termasuk kebebasan beropini dan kebebasan pers.

B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Demokratisasi di Indonesia

Globalisasi ditandai dengan pesatnya kapitalisme, memperluas peran pasar, investasi, dan produksi oleh perusahaan transnasional, serta didukung oleh ideologi dan aturan perdagangan bebas global. Globalisasi dapat dibedakan dalam tujuh kategori yaitu (Nasution, 2019):

1. Globalisasi keuangan melalui deregulasi dan merger
2. Globalisasi pasar dan strategi ekonomi
3. Globalisasi iptek dan riset
4. Globalisasi budaya
5. Globalisasi aturan pemerintahan
6. Globalisasi politik internasional
7. Globalisasi persepsi dan sosial-budaya.

Kecenderungan globalisasi, terutama dalam bentuk pertama dan kedua, tidak hanya memajukan negara industri, tetapi juga dapat mengakibatkan kemunduran bagi negara berkembang, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Hal ini menjadi peluang bagi negara maju untuk berinvestasi di negara berkembang, yang dapat merombak struktur sosial dan kekuasaan mereka, sehingga negara berkembang terpaksa menerima bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, investor asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional untuk mengakomodasi kepentingan asing. Pasca krisis 1997, seperti dalam kasus IMF yang mengintervensi kebijakan moneter, dampak globalisasi juga memberikan efek positif. Hal ini membuka peluang yang signifikan bagi pemerintah untuk memproduksi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyat, sekaligus memberikan kesempatan untuk bersaing secara sehat di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, langkah ini juga mendukung pengembangan ekspor non-migas yang sangat penting, serta menarik minat investasi dari dalam maupun luar negeri.

Bentuk kelima dan keenam globalisasi menunjukkan bahwa globalisasi mempengaruhi perubahan struktur kekuasaan dan menciptakan bentuk pemerintahan baru. Pengaruh politik internasional terhadap demokrasi muncul setelah PDII, terutama dengan runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Kampanye demokrasi oleh Ronald Reagan mendapat dukungan dari dunia Barat, mempengaruhi sistem politik negara berkembang yang mendapatkan tekanan untuk mendemokratisasikan diri. Kaum demokrat di negara berkembang didorong untuk menuntut reformasi politik melalui aksi protes terhadap pemerintahan otoriter agar melibatkan rakyat dalam kepemimpinan dan kebijakan nasional.

Indonesia merasakan perubahan sistem politik pasca krisis moneter 1998 yang menandai jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Meskipun mengklaim menjalankan demokrasi Pancasila, sistem otoriter Soeharto runtuh karena krisis dan meningkatnya kesadaran akan perlunya sistem yang lebih baik. Ini ditandai dengan penerimaan nilai-nilai demokrasi dan perubahan UUD 1945 yang sebelumnya dianggap sakral dan tidak bisa diubah.

Meskipun masih ada aspek pelaksanaan prinsip demokrasi yang perlu diperbaiki dalam konstitusi Indonesia, keinginan untuk mengubah UUD 1945 semakin kuat, baik dari lembaga negara maupun masyarakat sipil. Ini mencerminkan respons terhadap tuntutan global untuk demokratisasi. Pemilihan umum yang lebih demokratis telah dilaksanakan sejak 1999, 2004, dan 2009, menunjukkan kemajuan dibandingkan pemilu di masa Orde Baru yang hanya formalitas dan mengabaikan suara rakyat. Pemilihan umum 2009 meninggalkan banyak permasalahan, terutama hilangnya hak suara rakyat akibat ketidakberesan KPU dalam penyusunan daftar pemilihan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi KPU untuk mempersiapkan pemilu mendatang agar lebih baik dan demokratis, tanpa ada suara rakyat yang terlewat

C. Peran Masyarakat Sipil dalam memperkuat Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, keberadaan masyarakat sipil memiliki peranan yang krusial dalam memperkuat akuntabilitas birokrasi melalui mekanisme pengawasan publik. Pengawasan publik merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh sektor publik dengan tujuan untuk mengawasi kinerja birokrasi secara menyeluruh. Proses ini mencakup berbagai upaya dan mekanisme yang memastikan bahwa para pegawai dan instansi pemerintah mematuhi peraturan, ketentuan, serta kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka sistem demokrasi, pengawasan yang efisien merupakan faktor penting untuk meningkatkan akuntabilitas birokrasi pemerintah, yang pada gilirannya mendorong transparansi dan responsivitas dalam penyampaian layanan publik (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Ketika partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan meningkat, diharapkan pemerintah akan lebih transparan dan menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Metode pengawasan publik yang beragam, termasuk lembaga pengawas independen, mekanisme pengaduan masyarakat, serta evaluasi kinerja secara rutin, dapat diterapkan untuk menjamin peningkatan kualitas layanan publik. Melalui pengawasan yang cermat dan teliti, kekurangan yang ada dalam penyampaian layanan publik dapat dikenali dengan jelas. Setelah kekurangan tersebut terdeteksi, maka tindakan perbaikan yang sesuai dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dari seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat (Situmorang et al., 2020).

Dengan melakukan pemantauan secara aktif terhadap aktivitas birokrasi, masyarakat sipil dapat menekan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang merupakan ancaman serius bagi stabilitas demokrasi. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil memiliki peranan yang signifikan dalam menuntut akuntabilitas birokrasi terkait keputusan dan tindakan yang diambil (Pasaloran, 2021).

Dalam kerangka demokrasi, pengawasan publik berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi-fondasi demokrasi itu sendiri. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan birokrasi sangatlah penting, tidak hanya untuk menjamin mutu pelayanan publik, tetapi juga sebagai langkah dasar dalam mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

D. Strategi Memanfaatkan Globalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Kehadiran internet di era modern ini telah menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap runtuhnya rezim otoriter yang ada. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi yang pada gilirannya membangkitkan semangat untuk menuntut perubahan. Selain itu, internet juga sekaligus memberikan harapan baru untuk percepatan proses demokratisasi, karena memperkuat suara rakyat dan memfasilitasi gerakan sosial yang mendukung nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan. Internet juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya penerapan good governance yang merupakan tata kelola pemerintahan yang bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam perkembangan selanjutnya, internet juga berperan sangat penting dalam mendorong kelas menengah untuk berfungsi sebagai penggerak utama dalam proses demokrasi. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet, hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan pergeseran dalam praktik demokrasi, dari bentuk offline menuju bentuk online. Saat ini, masyarakat telah mengalami pergeseran menuju masyarakat informasi yang telah mengubah cara komunikasi politik. Melalui internet, para netizen berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah. Masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Siahaan et al., 2022).

Namun, selain memberikan dampak positif, keberadaan demokrasi digital juga menghadirkan masalah serius yang berkaitan dengan perilaku para pengguna internet itu sendiri. Karakter anomus sering kali berperan sebagai faktor yang berpotensi memicu munculnya gejala demokrasi yang tidak berarti, atau demokrasi yang hanya sekadar menjadi hiruk-pikuk yang dipenuhi dengan pergunjingan politik.

Perkembangan era digital membawa tantangan dan peluang baru bagi demokrasi. Inovasi teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, berpartisipasi dalam politik, dan memperoleh informasi. Memperkuat dasar-dasar demokrasi di zaman digital membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor teknologi, masyarakat sipil, dan setiap individu (Haning, 2019).

Salah satu langkah penting adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi digital di masyarakat. Pendidikan mengenai cara mengenali berita palsu, memahami algoritma di media sosial, serta melindungi privasi secara daring harus menjadi fokus utama. Dengan

peningkatan literasi digital, individu dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang valid dan terhindar dari manipulasi.

Transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi digital. Masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap informasi mengenai proses pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan maupun di perusahaan teknologi. Transparansi dalam penerapan algoritma, kebijakan moderasi konten, serta cara penggunaan dan perlindungan data pribadi juga termasuk dalam hal ini (Ahyaruddin & Akbar, 2017).

Penting untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan konstruktif di ranah digital. Hal ini dapat dilakukan melalui platform yang dirancang untuk menciptakan dialog yang sehat dan produktif, serta inisiatif yang mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan cara ini, teknologi dapat berperan dalam memperkuat keterlibatan demokratis, bukan sebaliknya.

Dengan strategi yang terintegrasi dan dedikasi terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan, aktif, dan berdaya. Era digital memberikan kesempatan yang sangat besar untuk memperkuat demokrasi, asalkan kita memiliki keberanian untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan yang ada.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa globalisasi memiliki dampak ganda terhadap demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi dapat memperkuat demokrasi melalui akses informasi dan keterlibatan masyarakat sipil yang lebih luas. Namun, di sisi lain, globalisasi memperburuk ketidakstabilan demokrasi melalui pengaruh korporasi besar dalam politik dan ketergantungan pada modal asing yang mengancam kedaulatan politik nasional. Era digital juga menawarkan peluang baru dalam memperkuat demokrasi, namun memerlukan strategi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai tantangan globalisasi terhadap demokrasi akan membantu pemerintah dan masyarakat sipil untuk merumuskan strategi dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1–14.

- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Siahaan, S. B., Simanjuntak, A., Simanjuntak, W. A., & Pasaribu, D. (2022). Penerapan Good Governance Berbasis Birokrasi Pemerintahan Digital Untuk Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 154–163. <https://doi.org/10.46880/jsika.Vol5No2.pp154-163>
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346.
- Ulfiyati, A., Muhamad, R., barri, M. fathur, & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan prospek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 435–444.